



**PENGARUH KEPERIBADIAN PRESIDEN JOKOWI DALAM KEBIJAKAN LUAR
NEGERI INDONESIA:
STUDI KASUS PELANGGARAN CINA DI NATUNA**

Tomy Darma Putra

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

South China Sea dispute is a complicated problem faced by ASEAN countries. Through the Nine Dash Line, China claims that the South China Sea still as its territory. China takes action by militarizing the islands in it. Even though Indonesia is not included in the disputes, it turns out that Natuna waters overlap with the Nine Dash Line owned by China. These problems had caused tensions between the two countries because China had intervened in law enforcement efforts carried out by Indonesian patrol vessels against Chinese fishing vessels that violated Indonesia's sovereignty. This study will explain the behavior of Indonesia in the dispute. Using the idiosyncratic approach, this study analyzes the political leader, Jokowi, specifically his personal character. This study will use content analysis that focus on Jokowi's statements on the dynamics of the South China Sea dispute and his response to sovereignty violation by China. The results of this study show that there are similarities in Jokowi's behavior patterns since he was a mayor in responding to a problem. In response to China, Jokowi has character of high nationalism, high need of power, high belief in control over event, low conceptual complexity, and low distrust to other.

Keywords: *South China Sea dispute, Nine Dash Line, idiosyncratic, Jokowi*

Pendahuluan

Kebijakan *Nine Dash Line* yang diberlakukan oleh Cina memicu ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan (DW 2015). *Nine Dash Line* merupakan sembilan garis imajiner yang menjadikan Cina memiliki kewenangan untuk mengklaim secara maksimal kontrol atas semua elemen seperti tanah, air, dasar laut di kawasan Laut Cina Selatan (Tsirbas 2016). Menjadi kontroversial, karena kebijakan ini melibatkan klaim-klaim pulau dan wilayah kelautan pada beberapa negara di sekitar wilayah tersebut yakni Taiwan, Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan termasuk Indonesia. Ditambah, tidak ada dasar hukum legal yang digunakan oleh Cina yang diakui secara internasional (TIME 2016). Beberapa kali Cina melakukan pelanggaran kedaulatan terhadap wilayah Indonesia akibat dari kebijakan *Nine Dash Line* yang diterapkan. Dilansir oleh CNN Indonesia (2016), sepanjang tahun 2016 setidaknya ada tiga pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh Cina di zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna.

Dalam periode pemerintahan Jokowi sejumlah langkah strategis telah dilakukan di antaranya adalah penenggelaman kapal asing, pengubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara, kunjungan langsung ke Natuna di mana konflik terjadi, serta penguatan sektor keamanan dan militer di kawasan Natuna. Dari uraian diatas pertanyaan yang muncul adalah “bagaimana kepribadian Presiden Jokowi berpengaruh pada kebijakan luar negeri

Indonesia di Laut Cina Selatan?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan pendekatan idiosinkretik, secara implisit idiosinkretik merupakan pendekatan dimana individu menjadi objek yang diteliti. Dalam konteks individu, objek yang bisa dianalisa tidak terbatas pada karakteristik personal (Hermann, 1980), proses kognitif individu (Rosati, 1987), gaya kepemimpinan (Kaarbo, 1997), namun juga kepribadian (Hermann, 1980; Dyson, 2006). Kepribadian yang dimiliki oleh individu tersebut nantinya akan berpengaruh pada keputusan yang ia buat. Tipe penelitian ini adalah eksplanatif yang menghubungkan antara variabel sebab-akibat dari studi kasus yang diambil. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yang didukung dengan metode wawancara. Penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan. Dalam pendahuluan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, serta metode penelitian. Bagian pembahasan berisi analisa untuk menjawab rumusan masalah, dan bagian kesimpulan berisi penutup yaitu hasil dari penelitian.

Pembahasan

Kompleksitas Konseptual yang Rendah dalam Perspektif Indonesia di Laut Cina Selatan

Dalam kasus Natuna Jokowi cenderung memiliki kompleksitas konseptual yang rendah. Ia menyampaikan statemen yang berhubungan dengan pelanggaran kedaulatan di Natuna, bahwa “*Nine Dash Line* yang diberlakukan Cina tidak mempunyai dasar dalam hukum internasional.” (Parameswaran 2015). Jokowi hanya menyampaikan dalam koridor penegakkan kedaulatan Indonesia, khususnya di Natuna sebagai perairan paling utara Indonesia. Dalam hal tersebut, secara eksplisit Jokowi dalam *Australian Broadcasting Corporation* menyatakan bahwa “dalam hubungannya dengan kedaulatan Indonesia, saya tidak berkompromi. Saya tidak berkompromi.” (Reuters 2016). Hal senada juga disampaikan Jokowi dalam wawancaranya dengan BBC (2016) yang menyatakan bahwa “berkaitan dengan Natuna, Natuna adalah teritori Indonesia, Natuna adalah wilayah Indonesia. Jadi kalau kita mengadakan latihan militer, mengadakan latihan perang di sana, ini hak kita, ini biasa saja. Hanya, untuk masalah kedaulatan, tidak ada kompromi *buat* saya.” Dari pernyataan tersebut bisa ditafsirkan bahwa Jokowi secara jelas tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran kedaulatan di Indonesia dan akan mengambil sikap yang tegas untuk menindaklanjutinya. Dalam menyikapi pelanggaran kedaulatan oleh negara-negara ASEAN, Indonesia memang cenderung agresif dan proaktif dalam tindakannya untuk merespon hal tersebut, dilihat dari jumlah kapal yang ditenggelamkan.

Meski demikian Jokowi menunjukkan respon lebih hati-hati dalam menanggapi agresivitas Cina di Laut Cina Selatan. Secara statistik Indonesia telah menenggelamkan kapal asing sebanyak 363 kapal selama periode 2014 sampai dengan 2017 (Liputan 6 2018). Dengan rincian Vietnam sebanyak 188 kapal, Filipina 77 kapal, Malaysia 55 kapal, Thailand 22 kapal, Indonesia 19 kapal, Cina satu kapal, dan tiga kapal berasal dari negara lainnya. Meskipun banyak kapal Cina yang masuk ke dalam teritori Indonesia hanya ada satu kapal yang ditangkap dan ditenggelamkan. Meskipun jumlah kapal yang berasal dari Cina cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara yang lain, namun justru kapal yang berasal dari Cina lah yang menimbulkan insiden yang membahayakan bagi hubungan kedua negara. Misalnya insiden Kapal Kway Fey dan Kapal Han Tan Chou yang kemudian direspon Jokowi dengan melakukan kunjungan langsung ke Natuna dan melakukan rapat terbatas di atas KRI Imam Bonjol sebagai langkah politis yang ditujukan bagi negara-negara di sekitar Indonesia, khususnya terhadap Cina. Secara politis, kehadiran Jokowi di wilayah sengketa tersebut untuk memberikan sinyal pada Cina dan negara-negara lain bahwa ia tidak akan berkompromi dengan kapal-kapal yang masuk secara ilegal di wilayah perairan Indonesia, serta untuk mengamankan kepentingan nasionalnya di perairan Natuna tersebut

(Parameswaran 2017). Manuver politik tersebut semakin jelas terlihat dari pejabat tinggi negara yang dibawa Jokowi ke Natuna. Diantaranya adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri ESDM Sudirman Said, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (CNN 2016).

Keengganan Jokowi menyelesaikan dalam lingkup multilateral dapat dilihat dari kebiasaannya sejak menjabat sebagai walikota dimana tiap permasalahan diselesaikan secara *face to face*. Sehingga dalam konteks ini, apabila diselesaikan melalui ASEAN, dengan melalui birokrasi dan protokol di dalamnya dikhawatirkan keputusan yang diambil akan terlalu lama, dan hal tersebut belum tentu bisa menguntungkan bagi Indonesia. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa tidak ada pihak ketiga yang melakukan intervensi dan menghalangi negara-negara anggota untuk mencapai konsensus. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Rini, mantan sekretaris Jokowi yang menyatakan bahwa Jokowi dalam berpikir selalu mencari solusi yang tercepat. Dalam konteks politik domestik misalnya, dengan melakukan komunikasi langsung, deregulasi dan reformasi birokrasi bidang pelayanan publik dan investasi. Maka dalam konteks Laut Cina Selatan, tindakan sepihak dan penyelesaian secara bilateral dinilai jauh lebih efektif untuk menyelesaikan masalah karena Indonesia bisa bergerak lebih leluasa, serta melakukan tindakan berdasarkan kepentingan Indonesia sendiri. Dengan kata lain, penyelesaian melalui forum regional tidak menguntungkan bagi Indonesia, khususnya bagi Jokowi.

Dari pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa Jokowi memiliki kompleksitas konseptual yang rendah, dalam hal ini ditunjukkan dari bagaimana Jokowi memahami konflik yang terjadi. Indonesia bersikap proaktif dan agresif ketika banyak negara-negara yang melakukan pelanggaran kedaulatan dan melakukan aktivitas ilegal di Natuna. Namun hal yang berbeda ditunjukkan Jokowi dalam menanggapi agresivitas Cina yang dilakukan secara lebih berhati-hati. Sikap berhati-hati yang ia tunjukkan bukan berarti ragu, namun ingin mempertegas bahwa Indonesia dalam kasus ini netral. Posisi netral ini memiliki keuntungan bagi Indonesia karena pada waktu yang bersamaan di bawah Jokowi Indonesia sedang membangun berbagai macam infrastruktur yang di dalamnya terdapat kerjasama antara Indonesia dengan Cina.

Nasionalisme yang Tinggi dalam Penegakkan Kedaulatan di Natuna

Dalam kasus ini, nasionalisme Jokowi ditunjukkan ketika menjadi presiden dengan membuat kebijakan poros maritim dunia. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin konektivitas antar pulau, mengembangkan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim (Presiden RI 2015). Untuk permasalahan mengenai konflik dengan negara lain, Jokowi mengeluarkan kebijakan diantaranya seperti penenggelaman kapal ilegal asing yang masuk, serta pengubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Penenggelaman kapal asing pertama kali dilakukan terhadap tiga kapal ikan milik Vietnam. Jokowi menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan negaranya diperlakukan secara tidak adil oleh negara-negara ASEAN lainnya, dan akan mempertimbangkan apakah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berdampak baik bagi Indonesia sebelum keputusan-keputusan yang bersifat regional akhirnya diambil (Piesse 2015). Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian ditafsirkan Piesse sebagai meningkatnya parokialisme, proteksionisme dan nasionalisme Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi. Selain itu, pengubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara menurut Arsana adalah sebagai langkah yang politis dan diplomatik bagi Indonesia untuk memberikan pesan yang jelas bagi Cina di tengah memanasnya sengketa di Laut Cina Selatan (Reuters 2017). Pernyataan Jokowi yang paling jelas untuk menanggapi agresivitas Cina di Laut Cina Selatan adalah ketika dia menyatakan bahwa “sembilan titik garis yang selama ini diklaim Cina dan

menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apa pun” (Merdeka 2015). Klaim ini kemudian memberikan legitimasi bagi Indonesia untuk menindak kapal asing yang masuk, khususnya kapal dari Cina yang dimaksud oleh Jokowi tersebut sesuai dengan hukum nasional Indonesia.

Dilansir dari Universitas Indonesia (2017), dalam Kuliah Umum “Menuju Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing” yang dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, ia menyampaikan bahwa pekerjaannya tersebut mustahil dilakukan tanpa dukungan penuh dari presiden. Lebih lanjut Susi menyampaikan bahwa bahkan presiden sampai marah karena harus tiga kali memerintahkan untuk menggelamkan kapal asing pencuri ikan. Dari pernyataan tersebut secara implisit bisa ditafsirkan bahwa kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan. Meski muncul kritik yang dilontarkan dari berbagai pihak atas kebijakannya yang dinilai keras tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa ia tidak akan berkompromi. “Negara ini yang punya wibawa dan kita tegas mengatasi hal ini, harus seperti itu. Menteri Luar Negeri saya tugaskan, jelaskan ke negara-negara itu. Ini masalah kriminal, ini masalah, ini masalah pencurian bukan masalah tetangga-tetangga, beda persoalannya.” (Setkab, 2014)

Dalam menanggapi agresivitas Cina tersebut, dua jalur ditempuh Indonesia sekaligus dalam menyikapi masalah tersebut, yakni komunikasi secara langsung dengan Cina dan penguatan sektor keamanan dan pertahanan di wilayah Natuna. Menkopolkam saat itu, Luhut Binsar Panjaitan diutus Jokowi untuk melakukan pembicaraan dengan Cina terkait dengan kerjasama dan konflik kedua negara pada April 2016 (Tempo 2016). Hasil pertemuan tersebut mampu menurunkan tensi kedua negara dari konflik yang tengah terjadi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Jokowi memiliki nasionalisme/in-group bias yang tinggi. Hal ini didasarkan pada persepsinya bagaimana ia memandang Indonesia, yang ditambah dengan perasaan yang kuat tentang kehormatan dan identitas nasional Indonesia. Wibawa, jati diri bangsa, merupakan hal yang sering disampaikan Jokowi dalam pidatonya terkait dengan politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam isu Laut Cina Selatan.

Kebutuhan akan Kuasa yang Tinggi terhadap Penangkapan Kapal Cina

Jokowi cenderung pada sifat kebutuhan akan kuasa yang berusaha mengembangkan dan memulihkan *power*nya dengan memposisikan kepentingan nasional Indonesia lebih tinggi serta bagaimana Jokowi memandang Indonesia dalam forum internasional. Kebijakan Poros Maritim Dunia sebagai operasionalisasi dari pernyataannya yang ingin “mengembalikan semuanya sehingga *jalesveva jayamahe*, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagi membahana.” (Setkab 2014). Pernyataan Jokowi tersebut merupakan upayanya untuk membangun citra, narasi untuk membangun reputasi Indonesia sebagai poros maritim dunia sehingga mampu meningkatkan *bargaining power* Indonesia dalam hubungan internasional.

Individu yang memiliki kebutuhan akan kuasa yang tinggi yang dalam penerapannya sering menggunakan kata-kata yang merefleksikan tindakan-tindakan yang bersifat menyerang, dan berusaha untuk mempengaruhi pihak lain (Dyson 2006). Lebih jauh Kebutuhan akan kuasa mengacu pada psikologi motivasi individu, yang menunjukkan dorongan untuk mendapatkan, mempertahankan, atau mengembalikan kendali individu atas orang, proses kebijakan, dan hasil. Individu yang lebih tinggi dalam kebutuhan akan kuasa secara proaktif akan membutuhkan kontrol dan keterlibatan pribadi yang lebih besar dalam kebijakan, dan output kebijakan yang ada merupakan cermin dari preferensi mereka, daripada menggunakan kelompok konsensus untuk memutuskan suatu kebijakan. Keterlibatan yang tinggi dalam isu yang sedang berjalan seperti di Natuna, kecenderungan untuk menggunakan

pandangan pribadi daripada melalui konsensus menjadikan kebutuhan akan kuasa Jokowi cenderung tinggi.

Dalam konteks penyelesaian isu Laut Cina Selatan misalnya, penggunaan kata “tenggelaman” yang memprovokasi negara-negara lain seringkali disampaikan Jokowi dalam menanggapi kapal ikan asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Dalam pidatonya Jokowi menyampaikan pada Menteri Susi Pudjiastuti,

Saya sampaikan kemarin, sudahlah tidak usah tangkap-tangkap, langsung tenggelamkan. Yak, betul, saya sampaikan. Tenggelamkan sepuluh atau dua puluh atau berapa, baru nanti *mikir*. Tapi orangnya diselamatkan dulu, nanti jadi ramai dengan negara lain kita. Ya kalau tidak ditegasin seperti itu, *tangkap tangkep tongkap tangkep* tidak akan *rampung*.” (Setkab 2014)

Contoh lain dalam Kuliah Umum di Universitas Gadjah Mada, Jokowi juga menyampaikan bahwa,

“Tenggelamkan kapalnya yang *nyuri-nyuri*. Saya tunggu seminggu, dua minggu tidak ada yang ditenggelamkan. Saya perintah lagi, tenggelamkan! Tidak ada lagi tapi alhamdulillah kemarin sudah, hari apa Jumat kemarin. Kita ini ragu-ragu terhadap hal-hal yang sudah jelas. Nelayan kita di Australia juga ditenggelamkan kok. UU kita sudah jelas, boleh. Tapi ada prosedurnya, diperingatkan masih *bandel*, diperingatkan ya sudah langsung tapi nelayannya diambil dulu. Jangan di-*bleng* langsung nelayannya ikut, ramai kalau yang itu.” (Setkab 2014)

Dalam menanggapi Cina yang memprovokasi Indonesia di Natuna, Indonesia menantang Cina, salah satu investor terbesar dan mitra dagangnya, dengan berusaha untuk menegaskan kendali atas perairan yang memiliki sumber daya yang melimpah, terutama cadangan minyak dan gas alam serta perikanan (New York Times 2017). Langkah Indonesia tersebut mulai tampak jelas saat negara-negara lain di kawasan cenderung bersikap lunak terhadap klaim kawasan kedaulatan laut Cina (DW 2017). Dalam konteks kasus ini, hubungan kedua negara sempat merenggang ketika insiden kapal ikan Kway Fey terjadi, dimana ketika kapal tersebut akan ditarik oleh kapal patroli Indonesia, muncul kapal penjaga pantai Cina yang mengejar dan menabrak kapal ikan tersebut agar rusak sehingga tak dapat ditarik. Hal ini berbuntut panjang yang kemudian direspon oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi (BBC 2016). Ia kemudian memanggil kuasa usaha Kedutaan Besar Cina di Jakarta sekaligus menyampaikan nota protes terkait aksi kapal penjaga pantai Cina di Laut Natuna. Hal tersebut dikarenakan kapal penjaga pantai milik Cina berusaha untuk mengintervensi penegakkan hukum yang dilakukan oleh Indonesia serta pelanggaran kedaulatan karena masuk ke dalam teritorial Indonesia tanpa izin.

Keyakinan Mengontrol Peristiwa yang Tinggi terhadap Rencana-rencana Pemerintah di Natuna

Berkaitan dengan respon terhadap perilaku agresif Cina di Natuna, terlihat bahwa Jokowi melakukan upaya unilateral dengan menggunakan pendekatan yang bersifat *hard power* dengan mengerahkan pasukan militer ke tempat konflik tersebut berada. Jokowi memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan masalah secara cepat dan proaktif terhadap masalah-masalah yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. Untuk masalah pelanggaran kedaulatan, tercatat bahwa dua kali Jokowi mengunjungi Natuna untuk meninjau langsung baik pembangunan militer dan sektor perikanan atau rapat terbatas di KRI Imam Bonjol pasca insiden dengan kapal penjaga pantai milik Cina. Sinyal untuk merespon pelanggaran oleh negara lain disampaikan oleh Jokowi dalam HUT ke-72 TNI yang menyatakan bahwa “sampai kapanpun juga kita harus waspada terhadap upaya dari luar yang

merongrong keutuhan wilayah Indonesia” (DW 2017). Pernyataan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rencana pemerintah untuk penempatan personil militernya. sebagaimana yang disampaikan Jokowi bahwa,

kita ini ingin menggeser pertahanan Indonesia ini ke pinggir [perbatasan], bukan hanya masalah Natuna saja. Menteri Pertahanan dan Panglima TNI juga sudah memetakan daerah-daerah yang rawan. Tapi memang yang akan dibangun terlebih dahulu adalah Natuna. Kita di sana akan bangun sisi ekonominya, dibangun kawasan industri perikanan, *plus* dengan pembangunan pelabuhannya yang baik, tapi juga pangkalan militer. Kita perlu ada pembangunan pangkalan militer di sana. Jadi seperti yang saya katakan di awal kita ingin menggeser pertahanan ke perbatasan, yang bersebelahan dengan negara lain.

Setelah kunjungannya ke Natuna terkait insiden dengan kapal penjaga pantai Cina, Jokowi lalu memaparkan langkah-langkah strategis dalam upayanya untuk membangun Natuna. Dalam rapat terbatas di Istana Negara, ia menyampaikan ada tiga poin yang menjadi fokus perhatian pemerintah, yakni “yang pertama, berkaitan dengan industri perikanan. Kedua, berkaitan dengan industri migas. Dan yang ketiga, berkaitan dengan pertahanan. Tiga hal ini yang akan kita detilkan lagi pada rapat terbatas kali ini.” (Presiden RI 2016). Lebih lanjut, untuk memperkuat kedaulatan di Natuna, dalam rapat terbatas tersebut Jokowi juga menyampaikan rencana strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah, misalnya pembangunan infrastruktur militer. “Di sektor pertahanan, untuk menjaga sumber daya alam dan kedaulatan kita, dalam rapat terbatas yang lalu telah saya perintahkan kepada TNI, khususnya TNI AL dan Bakamla, agar meningkatkan patroli dan penjagaan di wilayah Natuna. Infrastruktur yang ada di Natuna yang perlu dibangun dan diperbaiki saya kira juga harus dimulai.” (Presiden RI 2016).

Keyakinan mengontrol peristiwa yang tinggi juga ditunjukkan Jokowi dengan tidak mengandalkan forum ASEAN untuk lebih menekan Cina, padahal Cina berjalan sendiri dimana tidak ada negara yang mendukungnya dalam upaya klaim atas Laut Cina Selatan. Namun seperti yang dijelaskan oleh Parameswaran (2017), meskipun Indonesia telah mengajak negara-negara yang terlibat dalam konflik untuk mematuhi *Code of Conduct* sebagai satu-satunya instrumen yang menaungi sengketa Laut Cina Selatan namun tidak ada tindak lanjut yang pasti atas penyelesaian konflik tersebut. Masing-masing negara pada akhirnya menggunakan cara mereka sendiri untuk merespon tindakan agresif Cina tersebut. Dalam hal proses pengambilan keputusan, Preston dalam Dyson (2006) mengemukakan bahwa pemimpin yang lebih tinggi dalam keyakinan dalam kemampuan untuk mengendalikan peristiwa cenderung lebih memilih solusi kebijakan proaktif dan proses keputusan yang kurang deliberatif. Jokowi dalam wawancara dengan CNN (2016) mengenai pembangunan fasilitas militer di Natuna menyatakan bahwa “mau dibangun atau tidak dibangun itu kan kedaulatan kita, wilayah teritorial kita, kita tidak ada urusan dengan negara lain.”

Ketidakpercayaan terhadap Orang Lain yang Rendah dalam Hubungan Bilateral Indonesia – Cina

Dalam menyikapi pelanggaran kedaulatan tersebut, Indonesia lebih memilih menggunakan pendekatan bilateral, meskipun sebenarnya cakupan konfliknya lebih besar dari itu, hal ini dikarenakan penegasan Jokowi yang menyatakan netral terhadap sengketa Laut Cina Selatan. Meski begitu, pada saat yang bersamaan Jokowi tetap berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Cina. Keengganan Indonesia untuk menentang adanya *Nine Dash Line* tersebut secara lebih terbuka ternyata melemahkan upaya-upaya internasional untuk mendorong mundur klaim-klaim Cina yang semakin meluas, meskipun tindakan tersebut memudahkan Indonesia untuk menghindari pembicaraan-pembicaraan yang

sulit terkait dengan hubungan kerjasama dengan Cina (Conelly 2017). Alasan tersebut dikarenakan disaat yang bersamaan Indonesia di bawah Jokowi berusaha untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Cina, khususnya dalam proyek infrastruktur dan investasi. Sikap bersahabat juga ditunjukkan oleh para pejabat Indonesia dengan adanya arahan Jokowi pada Menkopolkam saat itu, Luhut Binsar Panjaitan, dimana Jokowi menyatakan bahwa Cina adalah “sahabat Indonesia”, dan mengutus Luhut ke Beijing enam minggu setelah insiden dengan kapal Cina pada Maret 2016 untuk menghadiri pertemuan mengenai masalah sengketa tersebut dan pembicaraan investasi dengan Cina (Conelly 2017). Saat kembali ke Jakarta, Luhut berupaya untuk melemahkan gagasan terkait adanya pelanggaran dan berupaya untuk bekerja sama dengan Cina dalam bidang perikanan di sekitar Natuna. Sebagai hasilnya, pasca pertemuan tersebut konflik kedaulatan antar kedua negara secara statistik menurun (Conelly 2017). Maka dalam menanggapi agresivitas Cina, menurut Piesse (2015) Jokowi tampaknya sangat menghargai hubungan dengan Beijing dan akan berhati-hati terhadap apa pun yang dapat membahayakan hubungan kedua negara. Selain karena alasan infrastruktur, jika militer Indonesia menanggapi secara keras kapal Cina yang masuk sebagaimana yang dilakukan terhadap negara-negara ASEAN, maka tindakan tersebut dapat memicu respon yang cepat dari Beijing. Oleh karena itu, tidak mungkin Jakarta akan mengerahkan kekuatan militer melawan negara yang jauh lebih kuat (Piesse 2015).

Pada awal menjabat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan bahwa Indonesia memerlukan sekitar 450 miliar dolar Amerika untuk investasi bidang infrastruktur selama lima tahun dari periode tahun 2015 hingga 2019, tetapi pemerintah ternyata hanya mampu menyediakan sepertiga dari jumlah tersebut (Bappenas 2015). Untuk mengisi celah investasi infrastruktur tersebut, Jokowi memutuskan untuk berpaling pada Beijing (Conelly 2017). Cina dalam hal ini menawarkan solusi pembangunan infrastruktur kepada Indonesia yang diklaim oleh mereka bisa dilakukan secara lebih murah dan lebih cepat. Keputusan ini lalu diambil karena disebabkan oleh anggaran yang terbatas pada waktu itu, sementara Jokowi mempunyai ambisi dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu para penasihat Jokowi mengatakan bahwa ia mengagumi pembangunan Cina yang pesat dan memandang Xi Jinping sebagai sesama pemimpin yang berorientasi pada hasil.

Bantuan dari Cina dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia dilakukan melalui inisiatif Jalur Sutera Maritim (*Maritime Silk Road*) dan Bank Investasi Infrastruktur Asia atau *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) yang baru memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperoleh pendanaan dengan syarat yang lebih mudah daripada mendapatkan dana dari pihak swasta (Conelly 2017). Maka untuk alasan itulah Jokowi memilih sikap yang lebih berhati-hati dan memilih netral dalam merespon tindakan agresif Cina di Laut Cina Selatan.

Kesimpulan

Jokowi merupakan pemimpin dengan karakter yang dicirikan dengan kompleksitas konseptual yang rendah, nasionalisme/*in-group bias* yang tinggi, kebutuhan akan kuasa yang tinggi, keyakinan mengontrol peristiwa yang tinggi, dan ketidakpercayaan terhadap orang lain yang rendah. Dalam konteks sengketa Laut Cina Selatan, Jokowi melalui pernyataannya menegaskan bahwa Indonesia netral dalam konflik tersebut dan tidak terlibat di dalamnya. Namun pada akhirnya Indonesia terlibat dalam konflik dengan Cina karena *Nine Dash Line* yang diklaim oleh Cina tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna. Konflik tersebut berbahaya karena mengancam kedaulatan Indonesia, serta mengganggu upaya pembangunan ekonomi daerah yang sedang dijalankan oleh Jokowi. Maka Jokowi sebagai presiden memiliki kewajiban untuk mempertahankan wilayah perairan tersebut dengan terlibat secara aktif di dalamnya. Berdasarkan ciri kepribadiannya tersebut maka tindakan yang dilakukan cenderung asertif untuk merespon perilaku Cina. Tindakan

asertif ini memiliki maksud bahwa tindakan yang diambil Jokowi adalah melalui dua jalur, yakni tegas terhadap penegakkan kedaulatan di Natuna sekaligus tetap menjaga hubungan baik dengan Cina.

Daftar Pustaka

- Connelly, Aaron L. (2016). *Indonesia in the South China Sea: Going It Alone*. *Lowy Institute*.
- Dyson, Stephen Benedict. (2006). Personality and Foreign Policy: Tony Blair's Iraq Decisions', *Foreign Policy Analysis*, pp. 289-306. Oxford: Blackwell Publishing.
- Hermann, Margareth G. (1980). Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders. *International Studies Quarterly*, Vol. 24, No. 1, pp. 7-46. Oxford: Blackwell Publishing.
- Kaarbo, Juliet. (1997). Prime Minister Leadership Styles in Foreign Policy. Decision-Making: A Framework for Research. *Political Psychology*, Vol. 18, No. 3.
- Piesse, Mervyn. (2015) Indonesian Foreign Policy and the Regional Impact of its Maritime Doctrine. *Future Directions International*.
- BBC. (2014). Angkatan Laut RI tenggelamkan kapal asing. Dalam https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141205_indonesia_kapal_asing. Diunduh pada 13 September 2018
- BBC. (2016). Tiba di Natuna, Jokowi gelar rapat di KRI yang tembak kapal Cina. Dalam http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160623_indonesia_jokowi_natuna. Diunduh pada 5 Desember 2017
- DW. (2016). Jokowi Kunjungi Natuna, Isyarat Tegas buat China. Dalam <https://www.dw.com/id/jokowi-kunjungi-natuna-isyarat-tegas-buat-cina/a-19349442>. Diunduh pada 29 September 2018
- Parameswaran, Prasanth. (2015). No, Indonesia's South China Sea Approach Has Not Changed. *The Diplomat*. Dalam <https://thediplomat.com/2015/03/no-indonesias-south-china-sea-approach-has-not-changed/>. Diunduh pada 1 Desember 2018
- Parameswaran, Prasanth. (2017). The Truth About China's Indonesia South China Sea Tantrum. *The Diplomat*. Dalam <https://thediplomat.com/2017/09/the-truth-about-chinas-indonesia-south-china-sea-tantrum/>. Diunduh pada 24 November 2018
- Reuters. (2016). Indonesian president says "no compromise" on South China Sea. Dalam <https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-indonesia-australia/indonesian-president-says-no-compromise-on-south-china-sea-idUSKBN13001E>. Diunduh pada 2 Desember 2018
- Sekretariat Kabinet. (2014). Sambutan Presiden Joko Widodo Pada Pembukaan Rakornas Kabinet Kerja 2014, di Istana Negara, Jakarta, 4 November 2014. Dalam <http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-pembukaan-rakornas-kabinet-kerja-2014-di-istana-negara-jakarta-4-november-2014/>. Diunduh pada 27 November 2018

Sekretariat Kabinet. (2014). Sambutan Presiden RI pada Pembukaan Munas KAGAMA ke-12, di Clarion Hotel, Kendari, Sulawesi Tenggara, 6 November 2014. Dalam <http://setkab.go.id/sambutan-presiden-ri-pada-pembukaan-munas-kagama-ke-12-di-clarion-hotel-kendari-sulawesi-tenggara-6-november-2014/>. Diunduh pada 27 November 2018

Tsirbas, Marina. (2016). What Does the Nine-Dash Line Actually Mean?. *The Diplomat*, Dalam <https://thediplomat.com/2016/06/what-does-the-nine-dash-line-actually-mean/>. Diunduh pada 5 Desember 2017

Universitas Indonesia. (2018). Peran Indonesia sebagai Negara Kepulauan Terbesar di Dunia. Dalam <http://www.ui.ac.id/berita/peran-indonesia-sebagai-negara-kepulauan-terbesar-di-dunia.html>. Diunduh pada 14 September 2018